

MODEL KEPEMIMPINAN PROFETIK RASULULLAH DALAM KONTEKS MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Iqbal Firdaus Ahmad¹, Haidar Al Ghazi Putra Burhanuddin², M. Fahrudin Azhar³,

Erdin Nadid⁴

Universitas Muhammadiyah Surabaya¹²³⁴

E-mail: Iqbalahmad2603@gmail.com¹, haidaralghazi123@gmail.com²,
fakhruddinazharhadisaputra03@gmail.com³, erdinnadid@um-surabaya.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas kepemimpinan profetik Rasulullah SAW dan relevansinya bagi masyarakat multikultural Indonesia. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, literatur sirah, Piagam Madinah, buku, dan artikel ilmiah, kemudian dianalisis melalui analisis isi, tafsir maudhu'i, dan pembacaan historis-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah dapat diterjemahkan menjadi integritas publik, tanggung jawab yang tidak diskriminatif, komunikasi dialogis, serta kecerdasan dalam membaca konteks. Piagam Madinah memperlihatkan cara Rasulullah SAW mengelola masyarakat majemuk tanpa menghapus identitas agama dan kelompok. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut relevan untuk memperkuat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, perlindungan kelompok minoritas, musyawarah, dan kebijakan publik yang adil. Kebaruan penelitian terletak pada penyusunan model integratif yang menghubungkan nilai profetik, pengalaman Piagam Madinah, dan kebutuhan kepemimpinan Indonesia. Model ini menempatkan kepemimpinan profetik bukan sekadar sebagai keteladanan moral, tetapi sebagai kerangka kerja yang dapat dinilai melalui keterbukaan, partisipasi, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama.

Kata kunci: kepemimpinan profetik; Rasulullah; multikulturalisme; Piagam Madinah; Indonesia

Abstract

This study examines the prophetic leadership of the Prophet Muhammad and its relevance to Indonesia's multicultural society. It employs a qualitative, descriptive-analytical literature review. Data from the Qur'an, hadith, prophetic biography, the Medina Charter, books, and scholarly articles are examined through content analysis, thematic Qur'anic interpretation, and historical-critical reading. The findings show that shiddiq, amanah, tabligh, and fathanah can be translated into public integrity, non-discriminatory responsibility, dialogical communication, and contextual intelligence. The Medina Charter demonstrates how the Prophet governed a plural society without erasing religious and communal identities. In Indonesia, these values are relevant to strengthening Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, minority protection, deliberation, and fair public policy. The study's novelty lies in an integrative model linking prophetic values, the Medina experience, and contemporary Indonesian leadership needs. The model treats prophetic leadership not merely as moral exemplarity but as an assessable framework based on transparency, participation, rights protection, and the common good.

Keywords: prophetic leadership; Prophet Muhammad; multiculturalism; Medina Charter; Indonesia

1. Pendahuluan

Indonesia hidup dalam ruang sosial yang sangat majemuk. Lebih dari tiga ratus kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, beragam tradisi, serta agama dan kepercayaan hadir dalam satu negara. Keragaman ini menjadi kekuatan ketika warga memperoleh ruang yang setara, tetapi dapat berubah menjadi ketegangan ketika identitas dipakai untuk membatasi hak, menutup dialog, atau membenarkan perlakuan yang berbeda (Ulfaturrohmaturirin dkk., 2021; Daffa dan Anggara, 2023).

Tantangan kepemimpinan di tengah kemajemukan tidak hanya menyangkut hubungan antaragama. Persoalan juga muncul pada relasi antaretnis, penghormatan terhadap budaya lokal, layanan bagi penganut kepercayaan, distribusi pembangunan, dan cara negara menangani ujaran kebencian. Pengalaman konflik Ambon dan Poso memperlihatkan bahwa ketegangan identitas dapat membesar ketika kepercayaan sosial melemah, komunikasi tertutup, dan institusi gagal hadir secara adil. Karena itu, kepemimpinan multikultural membutuhkan keberanian moral sekaligus kemampuan mengelola perbedaan secara nyata (Syafieh dan Anzaikhan, 2022; Maryono, Anna, dan Musthofa, 2024).

Dalam khazanah Islam, teladan kepemimpinan Rasulullah SAW menawarkan nilai yang dapat dibaca kembali untuk kebutuhan tersebut. Shiddiq menuntun pemimpin agar jujur dan konsisten; amanah mengikat kekuasaan pada tanggung jawab; tabligh menekankan komunikasi yang terbuka; sedangkan fathanah menuntut kecerdasan, ketepatan membaca keadaan, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Keempat nilai itu tidak berhenti sebagai sifat pribadi, tetapi berhubungan dengan cara pemimpin membangun kepercayaan, melibatkan masyarakat, dan melindungi pihak yang rentan (Nurhayati, 2024; Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024; Thoyibah dan Hajizah, 2025).

Penelitian terdahulu umumnya bergerak pada bidang yang terpisah. Sebagian kajian membahas kepemimpinan profetik dalam pendidikan dan organisasi, sebagian lain menelaah hubungan Piagam Madinah dengan masyarakat multikultural, sedangkan kajian tentang toleransi di Indonesia lebih banyak berfokus pada pendidikan, moderasi beragama, atau praktik kerukunan lokal. Ruang yang belum banyak dibahas ialah hubungan utuh antara nilai profetik, pengalaman politik Madinah, dan kebutuhan kepemimpinan Indonesia yang mencakup agama, etnis, serta budaya (Rasyid dkk., 2022; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Gunawan dan Kawakip, 2024).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini menjawab empat pertanyaan. Pertama, bagaimana karakteristik dan nilai inti kepemimpinan profetik Rasulullah SAW yang tercermin dalam shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah? Kedua, bagaimana Piagam Madinah merepresentasikan pola kepemimpinan yang inklusif terhadap masyarakat lintas agama, etnis, dan budaya? Ketiga, bagaimana relevansi nilai tersebut bagi masyarakat multikultural Indonesia? Keempat, apa implikasi praktisnya bagi pemimpin Indonesia kontemporer dalam menjaga kohesi sosial dan mengurangi konflik identitas?

Tujuan penelitian adalah menjelaskan karakteristik kepemimpinan profetik, menganalisis

Piagam Madinah sebagai pengalaman pengelolaan masyarakat majemuk, menilai relevansinya bagi Indonesia, dan merumuskan model penerapan yang dapat digunakan oleh pemimpin publik maupun organisasi. Kontribusi penelitian terletak pada penyatuan tiga lapisan analisis, yaitu nilai profetik sebagai fondasi moral, Piagam Madinah sebagai rujukan historis, dan Pancasila serta UUD 1945 sebagai kerangka konstitusional penerapan. Dengan susunan ini, kepemimpinan profetik tidak diletakkan sebagai slogan keagamaan, melainkan sebagai kerangka yang dapat diuji melalui perilaku dan dampak kebijakan (Purnomo, 2025; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024).

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep Profetik

Istilah profetik berasal dari kata prophet yang merujuk pada kenabian. Dalam kajian sosial dan kepemimpinan, profetik tidak berarti menjadikan pemimpin sebagai nabi, tetapi menjadikan orientasi kenabian sebagai sumber nilai. Orientasi itu menghubungkan dimensi ketuhanan dengan tugas kemanusiaan: membebaskan manusia dari ketidakadilan, membangun kehidupan yang bermartabat, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan secara moral (Nurhayati, 2024; Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024).

Konsep profetik juga menolak pemisahan antara kesalehan pribadi dan tanggung jawab publik. Pemimpin tidak cukup dinilai dari simbol, tutur agama, atau citra personal. Nilai profetik baru bermakna ketika tampak dalam kejujuran informasi, kesediaan menerima kritik, perlindungan terhadap warga yang berbeda, dan kemampuan mengutamakan kemaslahatan di atas kepentingan kelompok (Purnomo, 2025; Thoyibah dan Hajizah, 2025).

2.2 Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai amanah, bukan hak istimewa. Kekuasaan melekat pada kewajiban melayani, menegakkan keadilan, bermusyawarah, dan menjaga kepentingan bersama. QS An-Nisa [4]: 58 menghubungkan amanah dengan penetapan hukum secara adil, sedangkan hadis tentang setiap orang sebagai pemimpin menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya dimiliki pejabat formal. Kerangka ini membuat kepemimpinan bersifat etis sekaligus sosial (Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024; Febriana dkk., 2024).

Dalam praktiknya, kepemimpinan Islam tidak dapat dilepaskan dari musyawarah, keteladanan, dan kemampuan membaca keadaan. Musyawarah mencegah keputusan hanya ditentukan oleh suara yang paling kuat; keteladanan menjaga kesesuaian antara perkataan dan tindakan; sementara kecerdasan kontekstual membantu pemimpin memilih langkah yang tepat tanpa meninggalkan prinsip. Unsur tersebut memperlihatkan kedekatan kepemimpinan profetik dengan kepemimpinan transformasional, tetapi dengan penekanan lebih kuat pada pertanggungjawaban spiritual dan moral (Thoyibah dan Hajizah, 2025; Nurhayati, 2024).

2.3 Makna Multikulturalisme

Multikulturalisme bukan sekadar kenyataan bahwa masyarakat berbeda-beda. Konsep ini menuntut pengakuan bahwa setiap kelompok memiliki martabat, identitas, dan hak untuk ikut menentukan kehidupan bersama. Toleransi pasif hanya membiarkan orang lain hadir,

sedangkan multikulturalisme menuntut perlindungan hukum, kesempatan yang setara, keterwakilan, serta ruang aman untuk mengekspresikan agama dan budaya (Daffa dan Anggara, 2023; Rasyid dkk., 2022).

Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme bertemu dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya tidak menghapus identitas kelompok, tetapi menempatkan perbedaan dalam komitmen kebangsaan yang sama. Karena itu, kepemimpinan multikultural harus mampu mencegah dominasi mayoritas, membuka akses bagi kelompok kecil, dan memastikan bahwa forum musyawarah tidak hanya bersifat seremonial (Mala dan Hunaida, 2023; Maryono, Anna, dan Musthofa, 2024; Syafieh dan Anzaikhan, 2022).

2.4 Piagam Madinah dan Kerangka Konseptual

Piagam Madinah lahir dalam masyarakat yang terdiri atas Muhajirin, Ansar, kelompok-kelompok Yahudi, dan sekutu tribal. Dokumen tersebut mengatur kewajiban bersama, perlindungan, kebebasan menjalankan agama, serta penyelesaian perselisihan. Nilai pentingnya terletak pada upaya membangun komunitas politik tanpa menghilangkan identitas internal setiap kelompok (Ahmad, 2014; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Gunawan dan Kawakip, 2024).

Kerangka penelitian ini menghubungkan tiga unsur. Nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah menjadi fondasi; Piagam Madinah memberikan contoh historis tentang pengelolaan masyarakat plural; sedangkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi batas serta ruang penerapan di Indonesia. Dari hubungan tersebut dirumuskan empat dimensi: integritas, perlindungan yang setara, komunikasi partisipatif, dan kecerdasan kontekstual (Nurhayati, 2024; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Daffa dan Anggara, 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Studi kepustakaan digunakan karena fokus penelitian berupa gagasan, nilai, teks historis, dan relevansi sosial yang perlu dibaca secara mendalam. Pendekatan deskriptif dipakai untuk memaparkan konsep, sedangkan analisis dilakukan untuk menemukan hubungan antara nilai profetik, pengalaman Madinah, dan kebutuhan kepemimpinan Indonesia (Creswell dan Creswell, 2023). Kemudian Objek penelitian adalah teks dan gagasan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW dalam masyarakat majemuk. Sumber primer meliputi ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan amanah, keadilan, musyawarah, dan keberagaman; hadis tentang tanggung jawab pemimpin; literatur sirah; serta teks Piagam Madinah. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan kajian tentang kepemimpinan profetik, multikulturalisme, moderasi beragama, dan praktik kerukunan di Indonesia (Ahmad, 2014; Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024).

Sumber dipilih berdasarkan relevansi, identitas bibliografis yang jelas, keterlacakan naskah, dan hubungan langsung dengan pertanyaan penelitian. Artikel jurnal diprioritaskan dari lima tahun terakhir, sementara sumber yang lebih lama digunakan ketika memiliki kedudukan penting sebagai rujukan teori atau dokumen sejarah. Referensi yang tidak dapat ditelusuri tidak

digunakan sebagai dasar argumen. Dan data dikumpulkan melalui dokumentasi dan teknik baca-catat. Pencarian dilakukan pada Google Scholar, laman jurnal, JSTOR, serta repositori perguruan tinggi Islam dengan kata kunci kepemimpinan profetik, prophetic leadership, Piagam Madinah, Medina Charter, multikulturalisme, dan kepemimpinan inklusif. Setiap sumber dibaca, dicatat, lalu dikelompokkan ke dalam kartu data berdasarkan tema, konteks, dan fungsi argumennya (Creswell dan Creswell, 2023; Braun dan Clarke, 2021).

Analisis dilakukan melalui tiga cara yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi digunakan untuk menemukan pola nilai, tindakan, dan prinsip kepemimpinan dalam teks. Kedua, tafsir maudhu'i digunakan dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan amanah, keadilan, musyawarah, kejujuran, dan keberagaman, lalu membacanya sebagai satu tema. Ketiga, analisis historis-kritis digunakan untuk memahami Piagam Madinah sesuai kondisi sosial-politik zamannya agar penerapannya di Indonesia tidak bersifat literal (Sholihat dan Shintia, 2023; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024).

Tahap analisis dimulai dengan pembacaan berulang, pemberian kode, pengelompokan kode menjadi tema, perbandingan sumber, dan penyusunan interpretasi. Tema yang muncul kemudian diuji kembali terhadap pertanyaan penelitian. Proses ini menghasilkan empat tema utama: integritas, amanah publik, komunikasi inklusif, dan kecerdasan kontekstual (Braun dan Clarke, 2021). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, pengecekan silang antara sumber primer dan sekunder, serta telaah hasil interpretasi oleh sejawat atau pihak yang memahami studi Al-Qur'an, sirah, dan studi agama-agama. Karena penelitian tidak melibatkan informan, pemeriksaan ahli digunakan sebagai penilaian atas ketepatan interpretasi, bukan sebagai member checking terhadap partisipan. Kesimpulan hanya ditarik apabila didukung oleh lebih dari satu sumber atau memiliki dasar teks yang jelas (Creswell dan Creswell, 2023).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Kepemimpinan Profetik Rasulullah SAW

Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik Rasulullah SAW menggabungkan karakter personal, kemampuan sosial, dan tanggung jawab publik. Kepemimpinan tidak diukur hanya dari keberhasilan mencapai tujuan, tetapi juga dari cara tujuan itu dicapai dan dampaknya terhadap manusia. Karena itu, kejujuran, keadilan, komunikasi, dan kebijaksanaan tidak berdiri sendiri; semuanya membentuk satu kesatuan tindakan (Nurhayati, 2024; Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024; Purnomo, 2025).

Shiddiq berarti benar, jujur, dan selaras antara ucapan dengan tindakan. Dalam ruang publik, shiddiq tampak pada keterbukaan data, pengakuan atas kesalahan, dan keberanian menyampaikan keadaan tanpa manipulasi. Amanah berarti menempatkan jabatan sebagai tanggung jawab. Pemimpin yang amanah tidak membedakan pelayanan berdasarkan kedekatan politik, agama, suku, atau status sosial (Nurhayati, 2024; Purnomo, 2025).

Tabligh berkaitan dengan kemampuan menyampaikan pesan secara jelas sekaligus kesediaan mendengar. Dalam masyarakat plural, komunikasi satu arah mudah melahirkan salah paham. Tabligh karena itu mencakup dialog, konsultasi publik, mediasi, dan penjelasan

kebijakan dengan bahasa yang dapat dipahami berbagai kelompok. Fathanah melengkapi tiga sifat sebelumnya melalui kemampuan membaca situasi, memperkirakan risiko, dan memilih jalan yang paling membawa kemaslahatan (Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Thoyibah dan Hajizah, 2025).

4.2 Karakteristik Kepemimpinan Profetik dalam Masyarakat Plural

Dalam masyarakat plural, karakter pertama kepemimpinan profetik adalah pengakuan terhadap perbedaan. Piagam Madinah tidak melebur semua kelompok menjadi identitas tunggal. Setiap komunitas tetap memiliki ikatan agama dan sosialnya, tetapi terhubung oleh kesepakatan mengenai keamanan, tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa. Pola ini menunjukkan bahwa persatuan tidak harus dibangun melalui penyeragaman (Ahmad, 2014; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Gunawan dan Kawakip, 2024).

Karakter kedua adalah keadilan yang melampaui kedekatan kelompok. Amanah pemimpin berlaku kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang berbeda keyakinan atau tidak memiliki kekuatan politik. Karakter ketiga adalah musyawarah dan komunikasi. Kesepakatan bersama hanya dapat bertahan apabila pihak yang terlibat memahami hak, kewajiban, serta saluran penyelesaian masalah (Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Al Kalatini dkk., 2025).

Karakter keempat adalah keseimbangan antara nilai dan strategi. Rasulullah SAW memegang prinsip, tetapi cara penerapannya mempertimbangkan situasi. Kecerdasan ini penting karena masyarakat plural memiliki sejarah, rasa aman, dan kepentingan yang berbeda. Pemimpin harus mampu membedakan perkara prinsip yang tidak dapat ditawar dengan pilihan teknis yang masih dapat dimusyawarahkan (Purnomo, 2025; Febriana dkk., 2024).

4.3 Relevansi Kepemimpinan Profetik bagi Masyarakat Multikultural Indonesia

Relevansi pertama adalah penguatan integritas publik. Ketegangan sosial sering membesar ketika informasi tidak dipercaya atau hukum terlihat berpihak. Shiddiq menuntut pemerintah menjelaskan kebijakan secara jujur, membuka dasar pengambilan keputusan, dan menggunakan ukuran yang sama kepada semua warga. Integritas semacam ini menjadi modal awal untuk memulihkan kepercayaan lintas identitas (Ulfaturrohmatiririn dkk., 2021; Nurhayati, 2024).

Relevansi kedua adalah pelayanan yang tidak diskriminatif. Amanah mengharuskan pemimpin melayani pemeluk agama mayoritas, kelompok minoritas, penganut kepercayaan, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dengan standar yang setara. Prinsip tersebut sejalan dengan kedudukan warga negara dalam Pancasila dan UUD 1945 (Daffa dan Anggara, 2023; Syafieh dan Anzaikhan, 2022).

Relevansi ketiga adalah komunikasi dialogis. Forum Kerukunan Umat Beragama, musyawarah desa, konsultasi publik, dan mediasi konflik dapat menjadi ruang tabligh ketika tidak hanya menghadirkan elite yang sama. Dialog perlu melibatkan pihak yang mengalami langsung persoalan, termasuk kaum muda, perempuan, dan kelompok kecil yang sering tidak terwakili (Maryono, Anna, dan Musthofa, 2024; Mala dan Hunaida, 2023).

Relevansi keempat adalah kecerdasan kontekstual. Indonesia tidak dapat dikelola dengan satu resep untuk seluruh daerah. Setiap wilayah memiliki sejarah konflik, struktur adat, relasi antaragama, dan sumber daya yang berbeda. Fathanah menuntut penggunaan data, pemetaan aktor, pemahaman budaya lokal, serta evaluasi dampak sebelum kebijakan diterapkan (Purnomo, 2025; Rasyid dkk., 2022).

Penerapan nilai profetik juga menghadapi tantangan. Simbol agama dapat dipakai untuk membenarkan kepentingan politik, forum dialog dapat berhenti sebagai seremoni, dan sejarah Madinah dapat dibaca secara romantis tanpa mempertimbangkan perbedaan antara masyarakat abad ketujuh dan negara modern. Karena itu, nilai profetik harus ditempatkan untuk memperkuat konstitusi, bukan menggantikannya (Syafieh dan Anzaikhan, 2022; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Gunawan dan Kawakip, 2024).

4.4 Model Kepemimpinan Profetik Kontekstual

Berdasarkan hasil analisis, model kepemimpinan profetik kontekstual tersusun atas tiga lapisan. Lapisan pertama ialah fondasi nilai berupa shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Lapisan kedua ialah proses kepemimpinan berupa keterbukaan informasi, musyawarah, perlindungan hak, penggunaan data, dan mediasi. Lapisan ketiga ialah hasil yang diharapkan, yaitu kepercayaan publik, rasa aman, partisipasi, keadilan, dan kohesi sosial (Nurhayati, 2024; Purnomo, 2025; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024).

Tabel 1. Operasionalisasi model kepemimpinan profetik kontekstual

Nilai	Makna kepemimpinan	Bentuk penerapan	Indikator
Shiddiq	Kejujuran dan konsistensi	Keterbukaan data, alasan kebijakan, koreksi atas kesalahan	Informasi dapat diperiksa dan tidak manipulatif
Amanah	Tanggung jawab kepada seluruh warga	Pelayanan setara, perlindungan minoritas, mekanisme pengaduan	Hak dipenuhi tanpa diskriminasi
Tabligh	Komunikasi yang jelas dan dialogis	Konsultasi publik, mediasi, forum lintas identitas	Pihak terdampak didengar dan memperoleh penjelasan
Fathanah	Kecerdasan membaca konteks	Keputusan berbasis data, pemetaan konflik, adaptasi budaya lokal	Kebijakan tepat sasaran dan risiko berkurang

Tabel 1 memperlihatkan bahwa nilai profetik dapat diamati melalui tindakan. Suatu kebijakan tidak otomatis menjadi profetik hanya karena memakai istilah agama. Kebijakan

tersebut perlu diuji: apakah informasinya jujur, apakah hak warga dilindungi, apakah pihak terdampak dilibatkan, apakah keputusan berbasis data, dan apakah hasilnya mengurangi ketidakadilan (Purnomo, 2025; Nurhayati, 2024).

Model ini bersifat kontekstual karena tidak memindahkan bentuk politik Madinah secara literal ke Indonesia. Nilai dan pelajaran sejarahnya digunakan untuk memperkuat Pancasila, konstitusi, dan tata kelola demokratis. Dengan cara ini, identitas keagamaan yang kuat dapat berjalan bersama kewargaan yang setara (Gunawan dan Kawakip, 2024; Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Daffa dan Anggara, 2023).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Kepemimpinan profetik Rasulullah SAW relevan bagi masyarakat multikultural Indonesia ketika dipahami sebagai kerangka etis sekaligus cara kerja. Shiddiq membentuk integritas publik, amanah mengikat kekuasaan pada pelayanan yang setara, tabligh mendorong komunikasi dialogis, dan fathanah menuntut keputusan yang cerdas serta peka terhadap konteks. Keempat nilai tersebut saling melengkapi dan tidak dapat diterapkan secara terpisah (Nurhayati, 2024; Jafari, Maghribi, dan Salman, 2024; Purnomo, 2025).

Piagam Madinah menunjukkan bahwa masyarakat majemuk dapat dipersatukan melalui kesepakatan bersama tanpa menghapus identitas kelompok. Relevansinya bagi Indonesia bersifat prinsipil, bukan literal. Pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi landasan konstitusional, sedangkan nilai profetik memperkuat kejujuran, perlindungan hak, musyawarah, dan tanggung jawab pemimpin (Salma, Hidayat, dan Harahap, 2024; Gunawan dan Kawakip, 2024).

5. Saran

Penelitian ini menyarankan agar nilai profetik dimasukkan ke dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan melalui studi kasus, simulasi dialog, dan evaluasi dampak kebijakan. Lembaga publik juga perlu memiliki indikator keterbukaan, pelayanan non-diskriminatif, keterwakilan kelompok rentan, dan penyelesaian konflik. Penelitian berikutnya dapat menguji model ini melalui studi lapangan pada pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, atau forum lintas agama.

6. Daftar Pustaka

- Zainal Abidin Ahmad, Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Zaid Tsabit Al Kalatini, Mohammad Taufiq Rahman, Mochamad Ziaul Haq, and Fauzan Hilmi Aziz, 'The Concept of Religious Tolerance in the History of Islamic Civilization', *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 5.1 (2025), 109-118 <<https://doi.org/10.15575/jis.v5i1.43066>>.
- Virginia Braun, and Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide* (London: SAGE, 2021).
- John W. Creswell, and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 6th edn (Los Angeles: SAGE, 2023).
- Muhammad Daffa, and Indra Anggara, 'The Position of Local Religions in Interfaith Relations as a Form of Religious Moderation in Indonesia', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5.2

- (2023), 112-124 <<https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.369>>.
- Winda Febriana, Dona Nengsih, Asmendri Asmendri, and Milya Sari, 'Meneladani Gaya Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam Pendidikan Islam', Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP), 4.2 (2024), 217-222 <<https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.441>>.
- Satria Amir Makmun Gunawan, and Akhmad Nurul Kawakip, 'Relevansi Nilai-Nilai Piagam Madinah dan Pendidikan Islam pada Era Multikultural di Indonesia', Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan, 8.2 (2024), 311-331 <<https://doi.org/10.52431/murobbi.v8i2.3162>>.
- Muhammad Jafari, Hamdan Maghribi, and Abdul Matin bin Salman, 'Konsep Kepemimpinan Profetik dalam Pendidikan Islam', Alhamra Jurnal Studi Islam, 5.1 (2024), 97-109 <<https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i1.19644>>.
- Asnal Mala, and Wiwin Luqna Hunaida, 'Exploring the Role of Religious Moderation in Islamic Education: A Comprehensive Analysis of Its Unifying Potential and Practical Applications', Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 11.2 (2023), 173-196 <<https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.2.173-196>>.
- Maryono Maryono, Dian Nur Anna, and Muhammad Wakhid Musthofa, 'One Village, Three Houses of Worship: Exploring the Dynamics of Religious Tolerance in Indonesia', Jurnal Sosiologi Reflektif, 19.1 (2024), 1-26 <<https://doi.org/10.14421/qmhr0v26>>.
- Mafizatul Nurhayati, 'Prophetic Leadership: The Evolution of Thought', International Journal of Law Policy and Governance, 3.2 (2024), 112-124 <<https://doi.org/10.54099/ijlpg.v3i2.1069>>.
- Halim Purnomo, 'Prophetic Leadership: A Human Decision-Making Model in Islamic Educational Institutions', Journal of Islamic Communication and Counseling, 4.2 (2025), 80-88 <<https://doi.org/10.18196/jicc.v4i2.100>>.
- Harun Rasyid, Ahmad Bisyr Abd. Shomad, Hidayatulloh Hidayatulloh, Kamarusdiana Kamarusdiana, and Syamsul Yakin, 'Multicultural Education in Islamic Boarding School', TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 9.1 (2022), 77-92 <<https://doi.org/10.15408/tjems.v9i1.29071>>.
- Zahira Salma, Rahmat Hidayat, and Syahrul Mubarak Harahap, 'The Medina Charter and Lessons of Multiculturalism in Contemporary Islamic Politics', NEGREI: Academic Journal of Law and Governance, 4.2 (2024), 111-138 <<https://doi.org/10.29240/negrei.v4i2.11387>>.
- Novi Nur Sholihat, and Putri Mega Shintia, 'Metode Tafsir Maudhu'i Diperiksa Kembali', Jurnal Iman dan Spiritualitas, 3.4 (2023), 657-666 <<https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31105>>.
- Syafieh Syafieh, and M. Anzaikhan, 'The Moderate Islam and Its Influence on Religious Diversity in Indonesia', ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 23.2 (2022), 177-192 <<https://doi.org/10.14421/esensia.v23i2.3262>>.
- Firda Amalia Thoyibah, and Hajizah Hajizah, 'Model Kepemimpinan Profetik Rasulullah dalam Konteks Kepemimpinan Transformasional Modern', IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam, 3.3 (2025), 582-589 <<https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1100>>.
- Zahro Ulfaturrohmatiririn, Zulkipli Lessy, Isnan Arifin, Cahyaningtias Dwi Prabowo, Muhammad Zaki Mubarak, and Asih Rohmatul Listiani, 'Managing Plurality to Boost Harmony among Religious Adherents in Indonesia', Aplikasi: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 21.2 (2021), 137-146 <<https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2550>>.